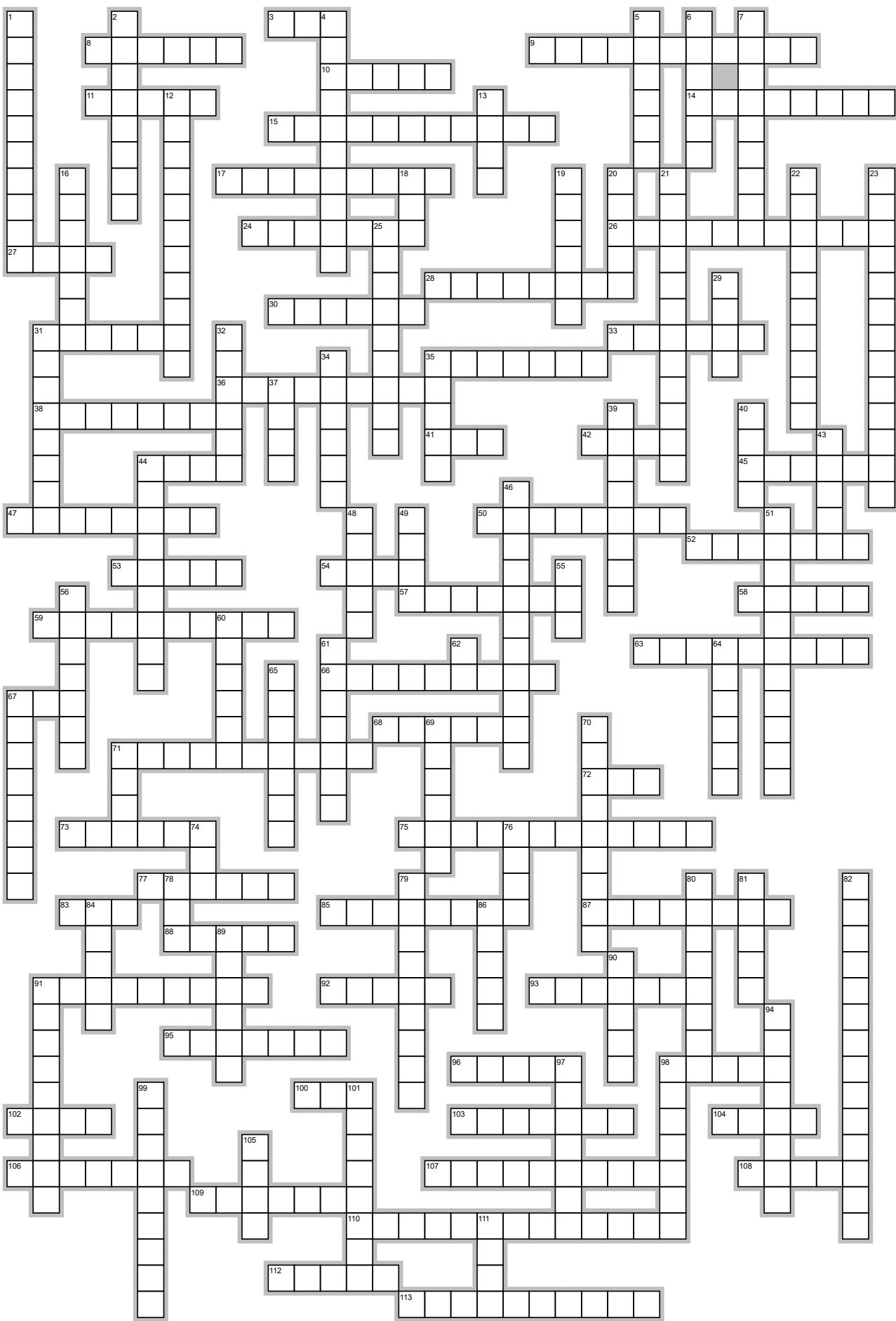


TTS BAWASLU

Bawaslu Banten



TTS BAWASLU

Bawaslu Banten

Across

3. Daftar pemilih tetap
8. Bimbingan teknis
9. Yang membantu komisioner bawaslu dalam tugas-tugas administratif
10. Struktur pengawas pemilu yang tidak permanen
11. Nama depan ketua Bawaslu Provinsi Banten
14. Pihak yang diajukan di dalam permohonan sengketa proses pemilu
15. Riset hukum yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau penegasan kembali atas konsep atau topik hukum tertentu
17. Yang mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS
24. Nama depan pengarang lagu mars Bawaslu
26. Mekanisme pencalonan kepala daerah dilakukannya dengan cara
27. Kabar bohong
28. Berudu
30. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak
31. Pertemuan secara terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan salah satu pihak berperkara, tanpa diketahui oleh pihak lainnya
33. Jujur dan adil
35. Verifikasi yang dilakukan secara langsung sesuai dengan fakta di lapangan
36. Bulan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020
38. Calon yang sedang menjabat
41. Tidak memenuhi syarat
42. Tradisi seserahan hasil bumi yang dilakukan oleh orang Baduy kepada pemerintah
44. Nama tengah anggota Bawaslu RI Divisi penindakan
45. Hukuman
47. Kode etik penyelenggara pemilu bersifat
50. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang melaksanakan Pilkada tahun 2020
52. Sistem informasi pengawasan pemilu
53. Kandidat
54. Sekolah kader pengawasan partisipatif
57. Pemilihan kepala daerah
58. Upaya hukum atas sengketa pemilihan terkait putusan KPU Provinsi/Kab.Kota sebagai hasil putusan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi/Kab.Kota diajukan ke
59. Peraturan badan pengawas pemilu
63. Salah satu unsur dalam GAKKUMDU
66. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau pengadilan

67. Memorandum of understanding
68. Cara memberikan pilihan dalam bilik suara
71. tahapan yang dilakukan setelah tindakan penyelidikan
72. Indeks kerawanan pemilu
73. Pencocokan dan penelitian
75. Penghitungan hasil pemungutan suara di tingkat kecamatan
77. Pemilihan umum
83. tempat pemungutan suara
85. Organisasi masyarakat yang diberikan izin mengawasi pemilu secara resmi
87. Keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Belanda)
88. Kandang kuda
91. Pasukan nasi bungkus
92. Salah satu bentuk kegiatan kampanye
93. Aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu/pemilihan yang dibuat oleh Bawaslu RI untuk memudahkan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu secara online
95. Mengikat
96. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
98. Langsung, umum, bebas, rahasia
100. Alat peraga kampanye
102. Sistem informasi penyelesaian sengketa
103. Pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok permohonan di mahkamah konstitusi
104. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
106. Kelelawar kecil
107. Sebutan bagi anggota Bawaslu
108. Nama belakang anggota Bawaslu RI Divisi penyelesaian sengketa
109. Kota baja
110. Daftar pemilih dalam pemilu harus
112. Salah satu unsur yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu
113. Menakut-nakuti, gertakan, ancaman

Down

1. Proses sengketa dalam pemilihan diselesaikan melalui mekanisme ...
2. Aktivitas atau kegiatan penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi adalah...
4. Sifat dari informasi tentang pemilu dan penyelenggara pemilu
5. Metode verifikasi terhadap syarat dukungan calon perseorangan
6. Parikan, paparikan, umpasa

TTS BAWASLU

Bawaslu Banten

Down

7. Sifat kelembagaan Bawaslu
12. Penyelidikan
13. Salah satu pilar demokrasi
16. Pencoblosan surat suara bersifat
18. Pegawai pemerintah yang harus netral dalam pemilu
19. Partai Politik
20. Salah satu kuliner dari Kota Serang
21. Calon kepala daerah yang tidak melalui partai politik
22. Salah satu kabupaten yang melaksanakan pilkada pada tahun 2020 di Provinsi Banten
23. Kedudukan lembaga Bawaslu dalam sistem negara dan pemerintahan di Indonesia
25. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan
29. Jaringan data informasi dan hukum
31. Kegiatan penyampaian visi misi dan program kerja peserta pemilu
32. Naik banding
34. Pelanggaran pemilu/pemilihan yang bersumber dari hasil pengawasan bawaslu
35. Nama depan anggota Bawaslu RI Divisi hukum
37. Pengawas tempat pemungutan suara
39. Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
40. Peraturan komisi pemilihan umum
43. Daerah pemilihan
44. Pernyataan kesepakatan bersama
46. Penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilu
48. Perwakilan partai politik atau peserta pemilu yang ada di setiap TPS
49. Dewan kehormatan penyelenggara pemilu
51. Jumlah pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya
55. Pergantian antar waktu
56. Rapat pleno penetapan hasil perolehan suara pemilu atau pemilihan bersifat
60. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilihan
61. Nama depan ketua Bawaslu RI yang pertama, periode 2008-2012
62. Mahkamah konstitusi
64. Mantan siswa
65. Salah satu tahapan penyelesaian sengketa di Bawaslu
67. Plt Ketua DKPP
69. Lonceng, alarm, kentongan
70. Anggota Bawaslu RI Divisi pengawasan dan sosialisasi
71. Panitia pengawas desa/kelurahan
74. Terstruktur, sistematis, dan massif
76. Perselisihan hasil pemilihan umum
78. Udang kecil-kecil yang dikeringkan
79. Petugas pemutakhiran data pemilih
80. Sentra penegakan hukum terpadu
81. Laporan harta kekayaan pejabat negara
82. Sanksi pembatalan
84. Mekanisme pengambilan keputusan di Bawaslu
86. Ketua Bawaslu RI
89. Masa 3 (tiga) hari sebelum hari pencoblosan, dimana peserta pemilu dilarang melakukan semua bentuk kampanye
90. Pengadil
91. Pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
94. Larangan bagi penyelenggara pemilu
97. Gabungan atau aliansi dari beberapa partai politik
98. Pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan masyarakat atau peserta pemilu/pemilihan
99. Pemilu yang memberikan kemudahan bagi kalangan difabel atau penyandang disabilitas
101. Hari dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan, adalah menggunakan hari ...
105. Maskot bawaslu yang perempuan
111. Seorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyelesaian sengketa